

ABSTRAK

Salamuddin, 2005. Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri 1 Stabat kabupaten Langkat. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Juli 2005.

Fakta menunjukkan bahwa pemberdayaan komite sekolah berdampak terhadap rendahnya peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan ketidakpuasan pada kualitas layanan pendidikan seperti beberapa kasus sekolah di Medan, Deli Serdang, Binjai dan Langkat (Waspada, 2004 dan 2005). Jika masalah itu tidak mendapat perhatian, dikhawatirkan bahwa 1) implementasi MBS menjadi tidak optimal, 2) komite sekolah hanya sebagai stempel untuk melegalisasi berbagai kutipan, 3) standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan tidak tercapai, 4) upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi terhambat, dan 5) ketidakpuasan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fungsi-fungsi pemberdayaan komite sekolah, mengetahui hambatan, dan solusi memberdayakan komite sekolah. Metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dari kepala sekolah, guru, pegawai dan komite sekolah. Penelusuran informasi dihentikan jika tidak ditemukan lagi data yang baru. Selanjutnya, dilakukan validasi data dengan triangulasi, penggunaan bahan referensi, mengadakan *membercheck*, serta membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi pemberdayaan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan terdiri atas *planning, actuating, coordinating, budgetting, facilitating, consultating collaborating, dan supporting*. Kedelapan fungsi itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara dinamis. Dalam pemberdayaan itu, ditemukan hambatan seperti kurang lancarnya komunikasi dan persepsi yang keliru terhadap peran komite sekolah. Solusi hambatan pemberdayaan komite sekolah diarahkan untuk meningkatkan frekuensi komunikasi tatap muka, dan membangun kepercayaan dengan kesediaan untuk terbuka dalam pengelolaan dana. Pendelegasian wewenang merupakan solusi yang ditawarkan oleh kepala sekolah dalam pemberdayaan karena salah satu dari implementasi MBS itu adalah meningkatkan peranserta masyarakat untuk turut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya, dengan membandingkan eksistensi peran komite sekolah dengan satuan pendidikan lain dapat disimpulkan bahwa ada empat model peran komite sekolah yakni, 1) komite sekolah model "Stempel", 2) komite sekolah model "Kuda Tunggang", 3) komite sekolah model "Parlemen", dan 4) komite sekolah model "Delegatif". Model yang terakhir merupakan konsep ideal yang belum terealisasi. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi sebelumnya, budaya sekolah, latar belakang pendidikan komite sekolah, dan gaya kepemimpinan kepala sekolah.

ABSTRACT

Salamuddin, 2005. The Empowerment of School Committee in Educational Program at SMA Negeri 1 Stabat, regency of Langkat. Thesis: Postgraduate Program of State University of Medan, July 2005.

The facts indicate that management of school committee empowerment influences the social participation in educational programs and decreases educational quality as found some cases in Medan, Deli Serdang, Binjai and Langkat (Waspada, 2004 and 2005). If the issue is not seriously, addressed it may result in (1) School Based Management (SBM) implementation is not optimal, (2) school committee play a role of legalization of fee collection, (3) the minimum standard of education all service is not achieved, (4) the policy for the increase of educational quality is disturbed, and (5) social dissatisfaction causes social unrest.

This research aims at discovering functions in school committee empowerment in educational program, describing obstacles and solution of any issues. Qualitative method by applying observation technique, interview and documentation study to obtain the data from school's principal, teacher, staff and school committee. This is followed by validation of data by triangulation, reference to depict any collected information, to do the membercheck, and to compare the results of interview to the field observation and documentation.

The findings of study indicate that activity of school committee empowerment in education program covers of planning, actuating, coordinating, budgetting, facilitating, consulting, collaborating and supporting. These eight management functions form a series of dynamic of implementation. In the empowerment issue, there are a number of obstacles, such as misunderstanding and communication on the role of school committee. While, the solution to this problem is directed to increase face to face communication frequency. In addition, the school principal is obliged to build a trust by a transparancy in society fund management. Authority delegation is a solution offered by school principal in the empowerment because one of SBM implementation policies is the role of society in educational program implementation.

Furthermore, with reference to the existence of school committee and other educational units it is concluded that there are four role models of school committee, nomely (1) a "Stamp" model of school committee, (2) a "Horse Ride" model of school committee, (3) a "Parliament" model of school committee, and (4) a "Delegative" model of school committee. The last model is an ideal one which has not been realized. This is due to the by previous situations and conditions, school cultures, backgrounds of school committee and the management styles of school principal.